



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusunan arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Kode Klasifikasi Arsip Universitas Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 459);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 180);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027
 9. Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Universitas Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di lingkungan Unsulbar.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.
6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media.

9. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.
10. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
11. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.
13. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.

Pasal 2

Kode Klasifikasi Arsip terdiri atas:

- a. Sistem Alfabetis, yaitu penataan arsip berdasarkan aturan alfabet;
- b. Sistem Numerik, yaitu penataan arsip berdasarkan nomor;
- c. Sistem Alfanumerik, yaitu penataan arsip berdasarkan gabungan antara alfabet dan nomor;
- d. Sistem Geografis/wilayah, yaitu penataan arsip berdasarkan tempat/wilayah; dan
- e. Sistem Subjek, yaitu penataan arsip berdasarkan susunan subjek.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Universitas Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Sistem Alfanumerik, yaitu penataan arsip berdasarkan gabungan antara alfabet dan nomor.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan fungsi dan tugas unit kerja berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

- (3) Rincian Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai acuan bagi unit pengelola arsip dalam mengelola arsip dinamis.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 18 Maret 2025

REKTOR,



MUHAMMAD ABDY
NIP 196901291994031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMER 4 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

KLASIFIKASI ARSIP

A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

I	PR	PERENCANAAN DAN PROGRAM			
	PR.00		A.	Pokok-Pokok Kebijakan Strategis	
	PR.00.00			1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
					Naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
	PR.00.01			2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
					Naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
	PR.00.02			3.	Rencana Strategis (RENSTRA)
					Naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (RENSTRA)
	PR.00.03			4.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (tambahan)
					Naskah yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (tambahan)
	PR.01		B.	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	PR.01.00			1.	Penyusunan RAPBN
					Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
				a.	Arah Kebijakan Umum, Strategis, Prioritas dan Rencana Strategis
				b.	Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)
				c.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) dan Standar Biaya Khusus (SBK)

PR.01.01		2.	Penyampaian RAPBN kepada DPR RI
			Naskah yang berkaitan dengan Penyampaian RAPBN kepada DPR RI
		a.	Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang APBN
		b.	Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan Komisi DPR-RI
		c.	Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN
		d.	Risalah rapat pembahasan anggaran Kementerian dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Komisi DPR RI
		e.	Nota Jawaban DPR RI terkait pembahasan RUU APBN
PR.01.02		3.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara
			Naskah yang berkaitan dengan Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara
PR.01.03		4.	Ketetapan Pagu Definitif
			Naskah yang berkaitan dengan Ketetapan Pagu Definitif
PR.01.04		5.	Ketetapan Pagu Alokasi
			Naskah yang berkaitan dengan Ketetapan Pagu Alokasi
PR.01.05		6.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
			Naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
PR.01.06		7.	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
			Naskah yang berkaitan dengan Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
PR.02		C.	Program Kerja Tahunan
PR.02.00		1.	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung
			Naskah yang berkaitan dengan Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung
PR.02.01		2.	Usulan dari Kemendikbud
			Naskah yang berkaitan dengan Usulan dari Kemendikbud

PR.02.02			3.	Program Kerja Tahunan Unit Kerja
				Naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Tahunan Unit Kerja
PR.02.03			4.	Program Kerja Tahunan Kemendikbud
				Naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Tahunan Kemendikbud
PR.02.04			5.	Naskah Kebijakan: Bahan Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Sidang Kabinet
				Naskah yang berkaitan dengan Naskah Kebijakan: Bahan Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Sidang Kabinet
PR.02.05			6.	Koordinasi kebijakan pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi antar Kementerian/ Lembaga
				Naskah yang berkaitan dengan Koordinasi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antar Kementerian/ Lembaga
PR.03			D. Penetapan/Kontrak Kinerja	
PR.03.00			1.	Menteri
				Naskah yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja Menteri
PR.03.01			2.	Pimpinan Unit Kerja
				Naskah yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja pimpinan unit kerja
PR.03.02			3.	Pejabat Tinggi Madya
				Naskah yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja pejabat tinggi madya
PR.04			E. Laporan	
PR.04.00			1.	Laporan Insidental
				Naskah yang berkaitan dengan laporan Insidental
PR.04.01			2.	Laporan Berkala
				Naskah yang berkaitan dengan laporan Berkala
PR.04.02			3.	Laporan Tahunan
				Naskah yang berkaitan dengan laporan Tahunan
PR.04.03			4.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

				a.	LAKIP Unit Kerja
				b.	LAKIP Kementerian
PR.05		F.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Kementerian		
			Naskah yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan/kementerian		
PR.05.00		1.	Rencana Strategis		
			Naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis		
PR.05.01		2.	Rencana kinerja tahunan		
			Naskah yang berkaitan dengan Rencana kinerja tahunan		
PR.05.02		3.	Perjanjian kinerja		
			Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja		
PR.05.03		4.	Rencana Aksi		
			Naskah yang berkaitan dengan Rencana Aksi		
PR.05.04		5.	Pengukuran kinerja		
			Naskah yang berkaitan dengan Pengukuran kinerja		
PR.06		G.	Monitoring dan Evaluasi		
			Naskah yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> dan evaluasi		
PR.06.00		1.	<i>Monitoring</i>		
			Naskah yang berkaitan dengan <i>monitoring</i>		
PR.06.01		2.	Evaluasi Program Unit Kerja		
			Naskah yang berkaitan dengan program unit kerja		
PR.06.02		3.	Evaluasi Program Kementerian		
			Naskah yang berkaitan dengan evaluasi program kementerian		
PR.07		H.	Perencanaan Anggaran		
PR.07.00		1.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)		
			Naskah yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)		

	PR.07.01			2.	Penelaahan dan Penyelarasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
					Naskah yang berkaitan dengan Penelaahan dan Penyelarasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
	PR.07.02			3.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Sasaran dan Asistensi
					Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Sasaran dan Asistensi
	PR.07.03			4.	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/Lembaga Alokasi Anggaran
					Naskah yang berkaitan dengan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/Lembaga Alokasi Anggaran
	PR.07.04			5.	Perencanaan dan Penganggaran
					Naskah yang berkaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran
	PR.07.05			6.	Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan
					Naskah yang berkaitan dengan Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan
	PR.08			I.	Revisi Anggaran
	PR.08.00			1.	Koordinasi Pengesahan Revisi Anggaran
					Naskah yang berkaitan dengan Koordinasi Pengesahan Revisi Anggaran
	PR.09			J.	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Unit Utama/Daerah
	PR.09.00			1.	Dokumen Perencanaan anggaran
					Naskah yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran unit utama/daerah
II	KU	KU	KEUANGAN		
	KU.00		A.	Pembinaan Perbendaharaan	
	KU.00.00		1.	Penyiapan bahan pengangkatan pejabat perbendaharaan	
				naskah yang berkaitan dengan Penyiapan bahan pengangkatan pejabat perbendaharaan	

KU.00.01			2.	Penilaian dan verifikasi usul calon pejabat perbendaharaan
				naskah yang berkaitan dengan Penilaian dan verifikasi usul calon pejabat perbendaharaan
KU.00.02			3.	Inventarisasi dan penyusunan informasi pejabat perbendaharaan
				naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi dan penyusunan informasi pejabat perbendaharaan
KU.00.03			4.	Pemantauan rekening pemerintah lainnya
				naskah yang berkaitan dengan Pemantauan rekening pemerintah lainnya
KU.00.04			5.	Penyiapan pertimbangan tuntutan perbendaharaan
				naskah yang berkaitan dengan Penyiapan pertimbangan tuntutan perbendaharaan
KU.01			B. Pelaksanaan Anggaran	
KU.01.00			1.	Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
				Naskah yang berkaitan dengan Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
KU.01.01			2.	Dokumen Realisasi Pendapatan
				Naskah yang berkaitan dengan Dokumen Realisasi Pendapatan
			a.	Surat Setor Pajak (SSP)
			b.	Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) atau buku penerimaan/bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			c.	Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja Penerimaan Bukan Pajak
			d.	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank
			e.	Piutang Negara
			f.	Pengelolaan Barang Milik Negara
KU.01.02			3.	Belanja
				Naskah yang berkaitan dengan Belanja

					a.	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk dokumen pembayarannya; pengumuman lelang, dokumen prakualifikasi, dokumen peninjauan lapangan, berita acara penjelasan pekerjaan, Berita acara pelelangan, usulan calon pemenang lelang, penetapan pemenang lelang, surat perintah kerja (SPK), kontrak/addendum kontrak
					1)	Barang Habis Pakai
					2)	Barang Inventaris
						- Barang Bergerak
						- Tanah dan Bangunan
					3)	Jasa
					4)	Software/komputer
					b.	Dokumen Pembayaran Keuangan
					1)	Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas
					2)	Bukti-bukti Tagihan dari pihak ketiga
					3)	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
					4)	Surat Perintah Membayar (SPM)
					5)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
					c.	Dokumen Tata Usaha Anggaran
					1)	Buku Kas Umum (BKU)
					2)	Buku Kas Pembantu (BKP)
					3)	Buku/kartu Pengawasan kredit anggaran
					4)	Rekening koran Bank
					5)	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

				6)	Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)
				7)	Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga
				8)	Daftar Rekapitulasi PNB
			d.	Daftar Gaji	
			e.	Tunjangan Kinerja	
			f.	Kartu Gaji	
			g.	Penggunaan dana Pemerintah RI untuk Kontribusi/iuran pada badan atau organisasi Internasional	
KU.01.03			4.	Badan Layanan Umum	
				Naskah yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum	
			a.	Usulan Badan Layanan Umum	
			b.	Usulan Standar Pelayanan Minimum	
			c.	Usulan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Badan Layanan Umum	
			d.	Usulan remunerasi dan tarif layanan BLU	
			e.	Laporan dewan pengawas	
			f.	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	
			g.	Lampiran RPP tarif PNB	
KU.02			C. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara		
KU.02.00			1.	Pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara	
				Naskah yang berkaitan dengan Pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara	
KU.02.01			2.	Penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara	
				Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara	
KU.02.02			3.	Penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara	
				Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara	

KU.02.03			4.	Penghitungan penetapan jumlah kerugian negara
				Naskah yang berkaitan dengan Penghitungan penetapan jumlah kerugian negara
KU.02.04			5.	Penyiapan pembebanan penggantian kerugian sementara
				Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan pembebanan penggantian kerugian sementara
KU.03			D. Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan	
KU.03.00			1.	Berita Acara Rekonsiliasi
				Naskah yang berkaitan dengan Berita Acara Rekonsiliasi
KU.03.01			2.	Daftar Transaksi (DT):
				Naskah yang berkaitan dengan Daftar Transaksi (DT)
			a.	Pengeluaran (PK)
			b.	Penerimaan,
			c.	Dokumen Sumber (DS)
			d.	Bukti Jurnal (BJ)
			e.	Surat Tanda Setor (STS),
			f.	Surat Setor Bukan Pajak (SSBP)
			g.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
			h.	SPM dalam Daftar
KU.03.02			3.	Laporan Keuangan
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan
			a.	Laporan Arus Kas (LAK) Tahunan
			b.	Neraca Tahunan
			c.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
				-Bulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
				-Triwulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
				-Tahunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

				d.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahunan
				e.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan
				f.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan
				g.	Laporan Realisasi Pendapatan Negara Tahunan
KU.04				E. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak	
KU.04.00			1.	Penyusunan usulan rencana penerimaan negara bukan pajak	
				Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan usulan rencana penerimaan negara bukan pajak	
KU.04.01			2.	Realisasi penerimaan negara bukan pajak	
				Naskah yang berkaitan dengan Realisasi penerimaan negara bukan pajak	
KU.04.02			3.	Penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak	
				Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak	
KU.04.03			4.	Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak	
				Naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak	
KU.05				F. Pengelolaan utang	
				Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan utang	
KU.06				G. Pengelolaan piutang	
KU.06.00			1.	Penghapusan piutang negara	
				Naskah yang berkaitan dengan penghapusan piutang negara	
KU.06.01			2.	Penyiapan pengurusan piutang negara	
				Naskah yang berkaitan dengan penyiapan pengurusan piutang negara	
KU.07				H. Bantuan /Pinjaman /Hibah	
KU.07.00			1.	Dalam Negeri :	
				Naskah yang berkaitan dengan bantuan/pinjaman/hibah dalam negeri	
			a.	Bantuan Pemerintah	
			b.	Hibah	

				c.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> , dan dokumen sejenisnya
				d.	Laporan
KU.07.01			2.		Luar Negeri:
					Naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman luar negeri, dokumen kesanggupan negara donor, dokumen <i>MoU</i> , pinjaman/hibah luar negeri dan alokasi dan relokasi penggunaan dana/hibah luar negeri
				a.	Permohonan Pinjaman Luar Negeri/daftar proyek yang dibiayai (Blue Book)
				b.	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk membiayai (Green book)
				c.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> , dan dokumen sejenisnya
				d.	Dokumen <i>Loan Agreement</i> pinjaman/hibah luar negeri (PHLN)
				e.	Alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri
				f.	Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri
				1)	<i>Reimbursement</i>
				2)	<i>Direct payment/ Transfer Procedur</i>
				3)	<i>Special Commitment L/C opening</i>
				4)	<i>Special Account/ Imprest Fund</i>
				5)	Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri
				6)	<i>Notice of Disbursement</i>
				g.	Otorisasi penarikan dana (<i>Payment Advice</i>)
				h.	Realisasi pencairan dana bantuan/hibah luar negeri: Surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM beserta lampirannya; SPP. Kontrak, Berita Acara dan data pendukung lainnya.
				i.	<i>Replenishment</i> (permintaan penarikan dana dari luar negara donor): <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of contract Withdrawal Authorization</i> (WA), <i>Statement of Expenditure</i> (SE)
				j.	Laporan:
				1)	Laporan Perkembangan
				2)	Laporan Bulanan

				3)	Laporan Triwulan
				4)	Laporan Akhir / Laporan Penyelesaian / Laporan Tahunan
				k.	Laporan hutang negara
				-	Laporan pembayaran hutang negara
				-	Laporan posisi hutang negara
				1.	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri
KU.08			I.	Penyiapan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	
				Naskah yang berkaitan dengan penyiapan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	
KU.09			J.	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
KU.09.00			1.	Keputusan pengguna anggaran tentang Penetapan;	
				Naskah yang berkaitan dengan keputusan pengguna anggaran tentang penetapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) / dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN)	
				1)	Berkas yang terkait dengan kuasa pengguna anggaran
				2)	Kuasa pengguna barang/jasa
				3)	Pejabat pembuat komitmen
				4)	Pejabat pembuat daftar gaji
				5)	Pejabat penandatanganan surat perintah membayar
				6)	Bendahara penerimaan/pengeluaran
				7)	Pengelola barang, termasuk berita acara serah terima jabatan
III.	KS	KS	KERJA SAMA		
	KS.00		A.	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU), Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama	
	KS.00.00		1.	Dalam Negeri	
				Naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU), Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	
	KS.00.01		2.	Luar Negeri ; Bilateral, Multilateral, dan Regional	
				Naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU), Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri	

KS.01		B.	Data dan Informasi Perencanaan dan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	
KS.01.00			1.	Pengelolaan Data dan Informasi
				Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Data dan Informasi dalam Negeri dan Luar Negeri
KS.01.01			2.	Penyajian Data dan Informasi
				Naskah yang berkaitan dengan Penyajian Data dan Informasi
KS.02		C.	Informasi Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	
KS.02.00			1.	Pendampingan Pelatihan Perencanaan Pendidikan dengan <i>United Nations of Educational Scientific Cultural and Organization (UNESCO)</i>
				Naskah yang berkaitan dengan Pendampingan Pelatihan Perencanaan Pendidikan dengan <i>United Nations of Educational Scientific Cultural and Organization (UNESCO)</i>
KS.02.01			2.	Pendampingan Pelatihan Perencanaan Pendidikan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Luar Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Pendampingan Pelatihan Perencanaan Pendidikan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Luar Negeri
KS.03		D.	Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	
KS.03.00			1.	Dalam Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam negeri
KS.03.01			2.	Luar Negeri ; Bilateral, Multilateral, dan Regional
				Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Luar Negeri ; Bilateral, Multilateral, dan Regional
KS.04		E.	Layanan Delegasi	
KS.04.00			1.	Fasilitasi layanan kunjungan delegasi asing ke Indonesia
				Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi layanan kunjungan delegasi asing ke Indonesia

KS.04.01			2.	Fasilitasi layanan kunjungan pimpinan dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian serta non pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Kementerian ke luar negeri
				Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi layanan kunjungan pimpinan dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian serta non pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Kementerian ke luar negeri
KS.05			F.	Layanan Teknis dan Administratif Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
KS.05.00			1.	Dalam Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan layanan Teknis dan Administratif Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dalam negeri
KS.05.01			2.	Luar Negeri ; Bilateral, Multilateral, dan Regional
				Naskah yang berkaitan dengan Layanan Teknis dan Administratif Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Luar Negeri ; Bilateral, Multilateral, dan Regional
KS.06			G.	Layanan Kedutaan
KS.06.01			1.	Layanan Duta Besar/Wakil Republik Indonesia, <i>United Nations of Educational Scientific Cultural and Organization (UNESCO)</i> dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
				Naskah yang berkaitan dengan Layanan Duta Besar/Wakil Republik Indonesia, <i>United Nations of Educational Scientific Cultural and Organization (UNESCO)</i> dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
KS.06.02			2.	Layanan Pendidikan dan Latihan Masyarakat Luar Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Layanan Pendidikan dan Latihan Masyarakat Luar Negeri
KS.07			H.	Administrasi Beasiswa
KS.07.00			1.	Beasiswa Darmasiswa Republik Indonesia
				Naskah yang berkaitan dengan Beasiswa Darmasiswa Republik Indonesia

KS.07.01			2.	Beasiswa Unggulan
				Naskah yang berkaitan dengan Beasiswa Unggulan
KS.08			I.	Layanan Sekolah Indonesia di Luar Negeri
KS.08.00			1.	Fasilitasi Layanan Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah dan Guru Indonesia
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Layanan Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah dan Guru Indonesia
KS.08.01			2.	Seleksi dan Penetapan Kepala Sekolah dan Guru Indonesia Seleksi dan Penetapan Kepala Sekolah dan Guru Indonesia
				Naskah yang berkaitan dengan Seleksi dan Penetapan Kepala Sekolah dan Guru Indonesia Seleksi dan Penetapan Kepala Sekolah dan Guru Indonesia
KS.08.02			3.	Kerja Sama Kemitraan dengan Lembaga Terkait
				Naskah yang berkaitan dengan Kerja Sama Kemitraan dengan Lembaga Terkait
KS.09			J.	Layanan Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dengan <i>United Nations of Educational Scientific Cultural and Organization (UNESCO)</i>
KS.09.00			1.	Fasilitas Layanan Kerja Sama
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitas Layanan Kerja Sama
			a.	kegiatan kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
			b.	pemberangkatan delegasi Indonesia untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
KS.09.01			2.	Peningkatan Jaringan Kerja Sama
				Naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Jaringan Kerja Sama
KS.09.02			3.	Percepatan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi ESD di Indonesia
				Naskah yang berkaitan dengan Percepatan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi ESD di Indonesia

	KS.10		K. Layanan Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dengan <i>The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres (SAMEOC)</i>
			Naskah yang berkaitan dengan Layanan Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dengan <i>The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centres (SEAMEOC)</i>
	KS.11		L. Pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, pameran, dan lomba internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan
			Naskah yang berkaitan dengan Pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, pameran, dan lomba internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan
IV.	KP	KP	KEPEGAWAIAN
	KP.00		A. Perencanaan Pegawai
	KP.00.00		1. Formasi (usul, penetapan, pengendalian)
			Naskah yang berkaitan dengan Formasi (usul, penetapan, pengendalian)
	KP.01		B. Pengadaan Pegawai
	KP.01.00		1. Penyiapan Bahan Seleksi Penerimaan CASN (PNS DAN PPPK)
			Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Bahan Seleksi Penerimaan CASN (PNS DAN PPPK)
	KP.01.01		2. Proses Seleksi Penerimaan CASN
			Naskah yang berkaitan dengan Proses Seleksi Penerimaan CASN
	KP.01.02		3. Berkas lamaran pegawai yang tidak diterima
			Naskah yang berkaitan dengan Berkas lamaran pegawai yang tidak diterima
	KP.01.03		4. Nota Usul dan kelengkapan penetapan NIP CASN
			Naskah yang berkaitan dengan Nota Usul dan kelengkapan penetapan NIP CASN
			a. Surat lamaran
			b. Ijazah
			c. SKCK
			d. Surat keterangan kesehatan
	KP.01.04		5. Penetapan Pengangkatan CASN
			Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Pengangkatan CASN

KP.01.05		6.	Pelatihan Dasar CASN
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Dasar CASN
KP.01.06		7.	Penetapan CASN menjadi ASN
			Naskah yang berkaitan dengan Penetapan CASN menjadi ASN
KP.02		C. Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan	
KP.02.00		1.	Ujian Penyesuaian Ijazah
			Naskah yang berkaitan dengan Ujian Penyesuaian Ijazah
KP.02.01		2.	Ujian Dinas
			Naskah yang berkaitan dengan Ujian Dinas
KP.03		D. Ujian Kompetensi	
KP.03.00		1.	Test Asesmen Pegawai
			Naskah yang berkaitan dengan Test Asesmen Pegawai
KP.03.01		2.	Pemetaan Profil Potensi / kompetensi pegawai
			Naskah yang berkaitan dengan Pemetaan Profil Potensi / kompetensi pegawai
KP.04		E. Pembinaan Karier Pegawai	
KP.04.00		1.	Diklat/kursus/magang/izin belajar pegawai/tugas belajar pegawai
			Naskah yang berkaitan dengan Diklat/kursus/magang/izin belajar pegawai/tugas belajar pegawai
KP.04.01		2.	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)
			Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)
		a.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
KP.04.02		3.	Pakta Integritas Pegawai
			Naskah yang berkaitan dengan Pakta Integritas Pegawai
KP.04.03		4.	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

KP.04.04			5.	Disiplin Pegawai
				Naskah yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai
			a.	Daftar hadir pegawai
			b.	Rekapitulasi daftar hadir pegawai
KP.04.05			6.	Hukuman Disiplin Pegawai
				Naskah yang berkaitan dengan Hukuman Disiplin Pegawai
KP.04.06			7.	Permasalahan Kepegawaian
				Naskah yang berkaitan dengan Permasalahan Kepegawaian
KP.04.07			8.	Penetapan Status Kepegawaian
				Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Status Kepegawaian
KP.04.08			9.	Penetapan dan/atau usul pemberhentian sementara, pengaktifan/ pengangkatan kembali, pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian/beristri lebih dari satu, dan keterangan untuk melakukan perceraian dan lain sejenisnya
				Naskah yang berkaitan dengan Penetapan dan/atau usul pemberhentian sementara, pengaktifan/pengangkatan kembali, pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian/beristri lebih dari satu, dan keterangan untuk melakukan perceraian dan lain sejenisnya
KP.04.09			10.	Tanggapan atas upaya administratif hukuman disiplin berupa keberatan atau banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin
				Naskah yang berkaitan dengan tanggapan atas upaya administratif hukuman disiplin berupa keberatan atau banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin
KP.04.10			11.	Tanggapan dan keberatan atas pengaduan masyarakat dan lembaga di bidang kepegawaian
				Naskah yang berkaitan dengan tanggapan dan keberatan atas pengaduan masyarakat dan lembaga di bidang kepegawaian
KP.04.11			12.	Pertimbangan hukum di bidang kepegawaian
				Naskah yang berkaitan dengan pertimbangan hukum di bidang kepegawaian
KP.04.12			13.	Penyusunan rancangan peraturan di bidang kepegawaian
				Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan di bidang kepegawaian

KP.05		F. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	
KP.05.00		1. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya dan Pratama) di lingkungan unit utama Kementerian	
		Naskah yang berkaitan dengan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya dan Pratama) di lingkungan unit utama Kementerian	
KP.05.01		2. Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan Dikti	
		Naskah yang berkaitan dengan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan Dikti	
KP.05.02		3. Seleksi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (rektor pada universitas/institut dan direktur pada politeknik/akademi komunitas)	
		Naskah yang berkaitan dengan seleksi Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (rektor pada universitas/institut dan direktur pada politeknik/akademi komunitas)	
KP.06		G. Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	
KP.06.00		1. Pengangkatan JPT (Madya dan Pratama) di lingkungan unit utama Kemendikbud	
		Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan JPT (Madya dan Pratama) di lingkungan unit utama Kemendikbud	
KP.06.01		2. Pengangkatan JPT Pratama di lingkungan PTN dan Lembaga Layanan Dikti	
		Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan JPT Pratama di lingkungan PTN dan Lembaga Layanan Dikti	
KP.06.02		3. Pengangkatan Jabatan Pemimpin PTN (rektor pada universitas/institut dan direktur pada politeknik/akademi komunitas)	
		Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Pemimpin PTN (rektor pada universitas/institut dan direktur pada politeknik/akademi komunitas)	
KP.07		H. Pembinaan Jabatan Fungsional	
KP.07.00		1. Pengangkatan Jabatan Fungsional	
		Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Fungsional	
KP.07.01		2. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	
		Naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	
KP.07.02		3. Pemindahan Jabatan Fungsional	
		Naskah yang berkaitan dengan Pemindahan Jabatan Fungsional	

KP.07.03			4.	Pengangkatan Jabatan Pelaksana
				Naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Pelaksana
KP.07.04			5.	Pemindahan Jabatan Pelaksana
				Naskah yang berkaitan dengan Pemindahan Jabatan Pelaksana
KP.07.05			6.	Pemberhentian Jabatan Fungsional
				Naskah yang berkaitan dengan Pemberhentian Jabatan Fungsional
KP.08			I.	Mutasi Pegawai
KP.08.00			1.	Kenaikan Pangkat/Golongan jabatan struktural dan fungsional
				Naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat/Golongan jabatan struktural dan fungsional
KP.08.01			2.	Berkas pengurusan Gaji Berkala
				Naskah yang berkaitan dengan Berkas pengurusan Gaji Berkala
KP.08.02			3.	Peninjauan/Penyesuaian Masa Kerja
				Naskah yang berkaitan dengan Peninjauan/Penyesuaian Masa Kerja
KP.08.03			4.	Penyesuaian Tunjangan Keluarga
				Naskah yang berkaitan dengan Penyesuaian Tunjangan Keluarga
KP.08.04			5.	Penyesuaian Kelas Jabatan
				Naskah yang berkaitan dengan Penyesuaian Kelas Jabatan
KP.08.05			6.	Mutasi Keluarga
				Naskah yang berkaitan dengan Mutasi Keluarga
KP.08.06			7.	Alih status/pindah instansi/pindah wilayah kerja/diperbantukan/dipekerjakan/mutasi antar unit kerja.
				Naskah yang berkaitan dengan Alih status/pindah instansi/pindah wilayah kerja/diperbantukan/dipekerjakan/mutasi antar unit kerja.
KP.09			J.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
KP.09.00			1.	Usul Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan struktural dan fungsional
KP.10			K.	Pendelegasian Wewenang
KP.10.00			1.	Pelaksanaan Tugas
				Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas

KP.10.01			2.	Pelaksanaan harian
				Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan harian
KP.11		L.	Administrasi Pegawai	
KP.11.00			1.	Data/Keterangan Pegawai
				Naskah yang berkaitan dengan Data/Keterangan Pegawai
KP.11.01			2.	Dokumentasi Identitas Pegawai
				Naskah yang berkaitan dengan Dokumentasi Identitas Pegawai
KP.11.02			3.	Penghargaan dan Tanda Jasa
				Naskah yang berkaitan dengan Penghargaan dan Tanda Jasa
KP.11.03			4.	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan
				Naskah yang berkaitan dengan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan
KP.12		M.	Cuti Pegawai	
KP.12.00			1.	Cuti Tahunan
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti Tahunan
KP.12.01			2.	Cuti Besar
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti Besar
KP.12.02			3.	Cuti Sakit
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti Sakit
KP.12.03			4.	Cuti Bersalin
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti Bersalin
KP.12.04			5.	Cuti Karena Alasan Penting
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti Karena Alasan Penting
KP.12.05			6.	Cuti di Luar Tanggungan Negara
				Naskah yang berkaitan dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara
KP.13		N.	Kesejahteraan Pegawai	
KP.13.00			1.	Layanan Pemeliharaan Kesehatan
				Naskah yang berkaitan dengan Layanan Pemeliharaan Kesehatan

KP.13.01			2.	Rekreasi/Kesenian/Olahraga
				Naskah yang berkaitan dengan Rekreasi/Kesenian/Olahraga
KP.13.02			3.	Bantuan Sosial
				Naskah yang berkaitan dengan Bantuan Sosial
KP.13.03			4.	Perumahan
				Naskah yang berkaitan dengan Perumahan
KP.14			O. Pemberhentian Pegawai	
KP.14.00			1.	Pemberhentian dengan Hormat
				Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dengan hormat
KP.14.01			2.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat/pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun
				Naskah yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat/pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun
KP.14.02			3.	Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda/PNS yang Tewas
				Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda/PNS yang tewas
KP.14.03			4.	SK Pemberhentian karena Meninggal Dunia tanpa Ahli Waris
				Naskah yang berkaitan dengan SK Pemberhentian karena meninggal dunia tanpa ahli waris
KP.14.04			5.	Pengunduran Diri sebagai CASN/ASN
				Naskah yang berkaitan dengan pengunduran diri sebagai CASN/ASN
KP.15			P. Perselisihan/Sengketa Pegawai	
				Naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa pegawai
KP.16			Q. Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil (Personal File)	
				Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil (Personal File)
			a.	Lamaran yang diterima
			b.	Nota penetapan NIP dan kelengkapannya
			c.	Nota persetujuan/pertimbangan BKN
			d.	SK Pengangkatan CPNS/CASN
			e.	Hasil Pengujian Kesehatan

			f.	SK Pengangkatan PNS/ASN
			g.	SK Peninjauan Masa Kerja
			h.	SK Kenaikan Pangkat
			i.	Surat pernyataan melaksanakan tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan
			j.	Pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional
			k.	Berita acara pelantikan dan serah terima jabatan
			l.	SK perpindahan wilayah kerja/antar instansi/mutasi
			m.	SK cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
			n.	Berita acara pemeriksaan (BAP)
			o.	SK Hukuman jabatan/Hukuman Disiplin ASN
			p.	SK diperbantukan/dipekerjakan/penugasan di luar instansi induk
			q.	SK Penarikan kembali dari perbantuan/dipekerjakan/ penugasan
			r.	SK pemberian uang tunggu
			s.	SK Pemberhentian sebagai PNS
			t.	SK Pemberhentian Sementara
			u.	SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara
			v.	SK Pemberhentian dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara
			w.	SK Pengalihan PNS/ASN
			x.	Surat pernyataan Kembalinya PNS/ASN yang dinyatakan hilang
			y.	SK Pengganti nama
			z.	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
			aa.	Akta nikah/cerai
			ab.	Akta Kelahiran
			ac.	Isian Formulir PUPNS/PUASN
			ad.	Berita acara pengambilan sumpah/janji PNS/ASN dan jabatan
			ae.	Surat permohonan menjadi anggota parpol
			af.	Surat Keterangan Meninggal dunia/Hilang
			ag.	Surat Keterangan Mutasi keluarga

			ah.	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
			ai.	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
			aj.	Surat Keterangan Hasil penelitian Khusus
			ak.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
			al.	Surat Tugas Kegiatan
			am.	Izin Belajar Dalam dan Luar Negeri
			an.	Surat Izin Bepergian ke Luar negeri
			ao.	Surat Persetujuan dan SK Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Kepegawaian
			ap.	Kartu Pendaftaran Ulang
			aq.	Ijazah/Sertifikat
			ar.	SK Penempatan/Penarikan Pegawai
			as.	SK Pengangkatan pada jabatan Kedinasan di Luar Instansi Induk
			at.	Surat Pertimbangan Status PNS
			au.	SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS
			av.	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena di calonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
			aw.	SK Penghargaan dan Tanda Jasa
			ax.	SK Pensiun
	KP.17		R.	Berkas Perseorangan Menteri
				Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Menteri
V.	HK	V		HUKUM
	HK.00		A.	Program Legislasi
	HK.00.00		1.	Materi/bahan rancangan program legislasi nasional dari Kementerian
				Naskah yang berkaitan dengan Materi/bahan rancangan program legislasi nasional dari Kementerian
	HK.00.01		2.	Program Legislasi Kementerian
				Naskah yang berkaitan dengan Program Legislasi Kementerian

HK.01		B. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	
HK.01.00		1	Rancangan Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum sampai diundangkan
			Naskah yang berkaitan dengan Rancangan Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum sampai diundangkan
HK.01.01		2	Rancangan Peraturan Pemerintah; rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum sampai diundangkan
			Naskah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah; rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum sampai diundangkan
HK.01.02		3	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden; rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
			Naskah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden; rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
HK.02		C. Peraturan Menteri; mulai dari rancangan awal, rancangan akhir, dan telaah hukum.	
			Naskah yang berkaitan dengan Peraturan Menteri; mulai dari rancangan awal, rancangan akhir, dan telaah hukum.
HK.03		D. Keputusan/Ketetapan pimpinan ; mulai dari rancangan awal, rancangan akhir, dan telaah hukum.	
HK.03.00		1.	Keputusan Menteri
			Naskah yang berkaitan dengan Keputusan Menteri
HK.03.01		2.	Keputusan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama
			Naskah yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama
HK.04		E. Instruksi/Surat Edaran; mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan telaah hukum.	
HK.04.00		1.	Instruksi/Surat Edaran Menteri
			Naskah yang berkaitan dengan Instruksi/Surat Edaran Menteri

HK.04.01		2.	Instruksi/Surat Edaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama
			Naskah yang berkaitan dengan Instruksi/Surat Edaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama
HK.05		F.	Surat Perintah
HK.05.00		1.	Surat Perintah Menteri
			Naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah Menteri
HK.05.01		2.	Surat Perintah Menteri
			Naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah Menteri
HK.06		G.	Standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/instansional, mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
			Naskah yang berkaitan dengan Standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/instansional, mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
HK.07		H.	Dokumentasi Hukum
HK.07.00		1.	Eksternal
			naskah yang berkaitan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi
HK.07.01		2.	Internal
			naskah yang berkaitan dengan produk peraturan perundang-undangan Kementerian yang dijadikan referensi
HK.08		I.	Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum
			Naskah yang berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum
HK.09		J.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan terkait pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan terkait pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
HK.10		K.	Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum/Advokasi
			Naskah yang berkaitan dengan Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum/Advokasi
HK.11		L.	Kasus/Sengketa Hukum
HK.11.00		1.	Pidana
			Naskah yang berkaitan dengan pidana

	HK.11.01		2.	Perdata
				Naskah yang berkaitan dengan perdata
	HK.11.02		3.	Tata Usaha Negara
				Naskah yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara
	HK.11.03		4.	Arbitrase
				Naskah yang berkaitan dengan Arbitrase
	HK.11.04		5.	Inventaris Perkara
				Naskah yang berkaitan dengan Inventaris Perkara
	HK.12		M. Hak atas Kekayaan Intelektual	
	HK.12.00		1.	Hak Cipta
				Naskah yang berkaitan dengan hak cipta
	HK.12.01		2.	Hak Paten
				Naskah yang berkaitan dengan hak paten
VI.	OT	VI	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	
	OT.00		A.	Organisasi
	OT.00.00		1.	Pembentukan, perubahan, pembubaran organisasi
				Naskah yang berkaitan dengan Pembentukan, perubahan, pembubaran organisasi
	OT.00.01		2.	Penataan Organisasi
				Naskah yang berkaitan dengan Penataan Organisasi
	OT.00.02		3.	Pembinaan Organisasi
				Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Organisasi
	OT.00.03		4.	Fasilitasi Organisasi
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Organisasi
	OT.00.04		5.	Evaluasi Organisasi/kelembagaan
				Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Organisasi/kelembagaan
	OT.01		B.	Reformasi Birokrasi Internal (RBI)
	OT.01.00		1.	Pelaksanaan RBI
				Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan RBI
	OT.01.01		2.	Fasilitasi RBI
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi RBI

	OT.01.02		3.	Evaluasi RBI
				Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi RBI
	OT.02		C.	Ketatalaksanaan
	OT.02.00		1.	Prosedur operasional standar (POS)
				Naskah yang berkaitan dengan Prosedur operasional standar (POS)
	OT.02.01		2.	Mekanisme kerja/tata hubungan kerja
				Naskah yang berkaitan dengan Mekanisme kerja/tata hubungan kerja
	OT.02.02		3	Penyiapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
				Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
	OT.02.03		4	Fasilitasi Ketatalaksanaan
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Ketatalaksanaan
	OT.02.04		5	Evaluasi Ketatalaksanaan
				Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Ketatalaksanaan
	OT.03		D.	Analisis Jabatan dan Pengembangan Jabatan Fungsional/struktural
	OT.03.00		1.	Analisis Jabatan
				Naskah yang berkaitan dengan Analisis Jabatan
	OT.03.01		2.	Fasilitasi analisis jabatan dan jabatan fungsional
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi analisis jabatan dan jabatan fungsional
	OT.03.02		3	Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional dan struktural
				Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional dan struktural
	OT.03.03		4	Evaluasi analisis jabatan
				Naskah yang berkaitan dengan evaluasi analisis jabatan
VII.	HM	VII	HUBUNGAN MASYARAKAT	
	HM.00		A.	Hubungan antar Lembaga
	HM.00.00		1.	Hubungan antar badan pemerintah
				Naskah yang berkaitan dengan Hubungan antar badan pemerintah
	HM.00.01		2.	Hubungan dengan organisasi sosial/LSM
				Naskah yang berkaitan dengan Hubungan dengan organisasi sosial/LSM

HM.00.02		3.	Hubungan dengan perusahaan
			Naskah yang berkaitan dengan Hubungan dengan perusahaan
HM.00.03		4.	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah
			Naskah yang berkaitan dengan Hubungan Perguruan Tinggi/Sekolah
HM.00.04		5.	Forum Kehumasan (Bakohumas)
			Naskah yang berkaitan dengan Forum Kehumasan (Bakohumas)
HM.00.05		6.	Hubungan dengan media massa
			Naskah yang berkaitan dengan Hubungan dengan media massa
		a.	Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara
		b.	Kunjungan wartawan/peliputan
HM.00.06		7.	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
			Naskah yang berkaitan dengan Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
HM.00.07		8.	Dokumen persidangan dan rapat (bahan sidang kabinet, rapat terbatas, rapat dengar pendapat DPR/DPD RI, rakor tingkat kementerian, Pidato Menteri, pidato kenegaraan tentang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
			Naskah yang berkaitan dengan Dokumen persidangan dan rapat (bahan sidang kabinet, rapat terbatas, rapat dengar pendapat DPR/DPD RI, rakor tingkat kementerian, Pidato Menteri, pidato kenegaraan tentang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
HM.00.08		9.	Penyelenggaraan acara kedinasan; pelantikan, peresmian, Upacara
			Naskah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan acara kedinasan; pelantikan, peresmian, Upacara
HM.01		B.	Penyajian Informasi
HM.01.00		1.	Publikasi
			Naskah yang berkaitan dengan publikasi
HM.01.01		2.	Penerbitan; majalah, buletin, jurnal
			Naskah yang berkaitan dengan Penerbitan; majalah, buletin, jurnal
HM.01.02		3.	Dokumen Hosting/Konten Media Sosial
			Naskah yang berkaitan dengan Dokumen Hosting/Konten Media Sosial
HM.01.03		4.	Publikasi melalui Pameran
			Naskah yang berkaitan dengan Publikasi melalui Pameran

	HM.01.04		5.	Dokumen Peliputan
				naskah yang berkaitan dengan Dokumen Peliputan
	HM.02		C. Pelayanan Publik	
	HM.02.00		1.	Layanan Perpustakaan
				Naskah yang berkaitan dengan layanan perpustakaan
	HM.02.01		2.	Layanan Pengaduan
				Naskah yang berkaitan dengan layanan pengaduan
	HM.02.02		3.	Permintaan Informasi/Data
				Naskah yang berkaitan dengan Permintaan Informasi/Data
	HM.03		D. Pengkajian	
	HM.03.00		1.	Analisa
				Naskah yang berkaitan dengan analisa
	HM.03.01		2.	Survey
				Naskah yang berkaitan dengan survey
	HM.04		E. Penghargaan/Apresiasi Karya Jurnalistik	
	HM.04.00		1.	Penilaian Lomba Foto
				Naskah yang berkaitan dengan penilaian lomba foto
	HM.04.01		2.	Penilaian Lomba Artikel
				Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Lomba Artikel
VIII.	LK	VIII PERLENGKAPAN		
	LK.00		A. Pengadaan Barang dan Jasa	
	LK.00.00		1.	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
				Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
	LK.00.01		2.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				Naskah yang berkaitan dengan Layanan Pengadaan secara Elektronik
	LK.00.02		3.	Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan
				Naskah yang berkaitan dengan Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan
			4.	Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
				Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendukung pengadaan barang/jasa

LK.01		B. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	
LK.01.00		1. Perencanaan BMN	
		Naskah yang berkaitan dengan Perencanaan BMN	
LK.01.01		2. Penggunaan	
		Naskah yang berkaitan dengan Penggunaan BMN	
		a. Penetapan Status Penggunaan (PSP)	
		b. Penetapan Status Penggunaan BMN yang dioperasikan pihak lain	
		c. Penggunaan Sementara	
		d. Alih Status Penggunaan	
LK.01.02		3. Pemanfaatan	
		Naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN	
		a. Sewa	
		b. Pinjam Pakai	
		c. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	
LK.01.03		4. Pemindahtanganan	
		Naskah yang berkaitan dengan Pemindahtanganan BMN	
		a. Penjualan	
		b. Hibah	
		c. Tukar Menukar	
		d. Penyertaan Modal Pemerintah	
LK.02		C. Dokumen kepemilikan aset Kementerian	
LK.02.00		1. Sertifikat tanah, IMB, <i>blueprint</i> gedung dll	
		Naskah yang berkaitan dengan Sertifikat tanah, IMB, <i>blueprint</i> gedung dll	
LK.02.01		2. Dokumen Rumah Dinas Golongan I, II, dan III	
		Naskah yang berkaitan dengan Dokumen Rumah Dinas Golongan I, II, dan III	
LK.02.02		3. BPKB, STNK	
		Naskah yang berkaitan dengan BPKB, STNK	
LK.03		D. Daftar Barang Milik Negara/Inventarisasi BMN	
LK.03.00		1. Keputusan pembentukan tim	
		Naskah yang berkaitan dengan Keputusan pembentukan tim	

LK.03.01		2	Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi
			Naskah yang berkaitan dengan Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi
LK.03.02		3	Kertas kerja inventarisasi
			Naskah yang berkaitan dengan Kertas kerja inventarisasi
LK.03.03		4	Berita acara inventarisasi
			Naskah yang berkaitan dengan Berita acara inventarisasi
LK.03.04		5	Daftar inventaris/Buku barang/Daftar barang
			Naskah yang berkaitan dengan Daftar inventaris/Buku barang/Daftar barang
LK.03.05		6	Laporan hasil inventarisasi
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan hasil inventarisasi
LK.04	E.		Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
LK.04.00		1	Daftar barang kuasa/pengguna
			Naskah yang berkaitan dengan Daftar barang kuasa/pengguna
LK.04.01		2	Kartu identitas barang
			Naskah yang berkaitan dengan Kartu identitas barang
LK.05	F.		Laporan Barang Milik Negara (BMN)
LK.05.00		1	Laporan kondisi barang
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan kondisi barang
LK.05.01		2	Laporan barang kuasa pengguna
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan barang kuasa pengguna
LK.05.02		3	Berita Acara rekonsiliasi eksternal dan internal
			Naskah yang berkaitan dengan Berita Acara rekonsiliasi eksternal dan internal
LK.05.03		4	Laporan persediaan barang habis pakai
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan persediaan barang habis pakai
LK.05.04		5	Laporan persediaan barang tidak habis pakai
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan persediaan barang tidak habis pakai
LK.05.05		6	Laporan pengelolaan BMN
			Naskah yang berkaitan dengan Laporan pengelolaan BMN
LK.06	G.		Penghapusan Barang Milik Negara
			Pelaksanaan penghapusan barang milik negara
			Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan barang milik negara

	LK.06.00			1	Keputusan pembentukan Tim
	LK.06.01			2	Berita Acara penghapusan BMN
	LK.06.02			3	Daftar barang yang dihapus
	LK.06.03			4	Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN
IX.	TU	IX	KETATAUSAHAAN		
	TU.00		A.	Persuratan	
	TU.00.00			1.	Pembinaan Persuratan
					Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Persuratan
	TU.00.01			2.	Pengelolaan persuratan
					Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan persuratan
				a.	Buku agenda (manual/elektronik)
				b.	Buku ekspedisi (manual/elektronik)
	TU.01		B.	Kearsipan	
	TU.01.00			1.	Penyiapan kebijakan kearsipan
					Naskah yang berkaitan dengan penyiapan kebijakan kearsipan
	TU.01.01			2.	Pembinaan Kearsipan
					Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Kearsipan
				a.	Apresiasi/Sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/workshop
				b.	Bimbingan teknis, supervisi, pengawasan kearsipan
	TU.01.02			3.	Pengelolaan Arsip Dinamis
					Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis
				a.	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis
				b.	Daftar Arsip Aktif, arsip inaktif
				c.	Daftar arsip informasi publik
				d.	Daftar arsip vital
				e.	Daftar Arsip Terjaga
				f.	Alih Media Arsip
				g.	Autentikasi Arsip
				h.	Pemeliharaan dan Perawatan Arsip
	TU.01.03			4.	Layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)
					Naskah yang berkaitan dengan Layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)

	TU.01.04		5.	Penyusutan Arsip
				Naskah yang berkaitan dengan Penyusutan Arsip
			a.	Pemindahan arsip inaktif
			1)	Berita acara pemindahan
			2)	Daftar arsip yang dipindahkan
			b.	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
			1)	Berita acara pemusnahan
			2)	Daftar arsip yang dimusnahkan
			3)	Rekomendasi/persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI
			4)	Surat keputusan pemusnahan arsip
			c.	Penyerahan arsip statis
			1)	Berita acara serah terima arsip statis
			2)	Daftar arsip yang diserahkan
	TU.02		C.	Keprotokolan
	TU.02.00		1.	Penerimaan Tamu Dinas
				Naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Tamu Dinas
	TU.02.01		2.	Jamuan Makan/Resepsi
				Naskah yang berkaitan dengan Jamuan Makan/Resepsi
	TU.02.02		3.	Acara Kedinasan
				Naskah yang berkaitan dengan Acara Kedinasan
	TU.02.03		4.	Upacara/Peringatan Hari Besar
				Naskah yang berkaitan dengan Upacara/Peringatan Hari Besar
	TU.02.04		5.	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
				Naskah yang berkaitan dengan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
	TU.02.05		6.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pimpinan
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pimpinan
X	RT	X	KERUMAHTANGGAAN	
	RT.00		A.	Ketertiban dan Keamanan Kantor, Kebersihan dan Keindahan Kantor
	RT.00.00		1.	Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
				Naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan

RT.00.01		2.	Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
			Naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
RT.01		B.	Peningkatan Manajemen Pengelola Gedung
RT.01.00		1.	Bimbingan Teknis Layanan Operator Kantor
			Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Layanan Operator Kantor
RT.01.01		2.	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Teknis Utilitis Gedung
			Naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Teknis Utilitis Gedung
RT.01.02		3.	Fasilitas dan Simulasi Evakuasi Kebakaran Gedung
			Naskah yang berkaitan dengan Fasilitas dan Simulasi Evakuasi Kebakaran Gedung
RT.02		C.	Pemeliharaan dan Utilitas Kantor
RT.02.00		1.	Gedung Kantor
			Naskah yang berkaitan dengan Gedung Kantor
RT.02.01		2.	Halaman/Taman Gedung Kantor
			Naskah yang berkaitan dengan Halaman/Taman Gedung Kantor
RT.02.02		3.	Peralatan dan Mesin
			Naskah yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin
RT.02.03		4.	Kendaraan Roda Empat/Enam
			Naskah yang berkaitan dengan Kendaraan Roda Empat/Enam
RT.02.04		5.	Kendaraan Roda Dua
			Naskah yang berkaitan dengan Kendaraan Roda Dua
RT.02.05		6.	Penggantian Peralatan Kendaraan Dinas
			Naskah yang berkaitan dengan Penggantian Peralatan Kendaraan Dinas
RT.03		D.	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
RT.03.00		1.	Penataan Prasarana Kantor
			Naskah yang berkaitan dengan Penataan Prasarana Kantor
RT.03.01		2.	Gedung
			Naskah yang berkaitan dengan Gedung
RT.03.02		3.	Depo Arsip dan Pergudangan
			Naskah yang berkaitan dengan Depo Arsip dan Pergudangan

RT.04		E. Operasional dan Layanan	
RT.04.00		1. Pakaian Kerja	Naskah yang berkaitan dengan Pakaian Kerja
RT.04.01		2. Pembayaran Pajak	Naskah yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak
RT.04.02		3. Pembayaran Rekening Listrik, Air, dan telepon	Naskah yang berkaitan dengan Pembayaran Rekening Listrik, Air, dan telepon
RT.04.03		4. Administrasi Kepegawaian PPNNP	Naskah yang berkaitan dengan Administrasi Kepegawaian PPNNP
RT.04.04		5. Sewa Kendaraan	Naskah yang berkaitan dengan Sewa Kendaraan
RT.04.05		6. Layanan Pimpinan Kementerian	Naskah yang berkaitan dengan Layanan Pimpinan Kementerian
RT.04.06		7. Jasa Kontaktual Lainnya (PPNNP)	Naskah yang berkaitan dengan Jasa Kontaktual Lainnya (PPNNP)
RT.05		F. Poliklinik	
RT.05.00		1. Layanan Kesehatan/Rekam Medis	Naskah yang berkaitan dengan Layanan Kesehatan/Rekam Medis
XI. TI	XI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
TI.00		A. Rencana strategis/masterplan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Naskah yang berkaitan dengan rencana strategis/masterplan pembangunan sistem informasi (SIM)
TI.01		B. Implementasi SIM	naskah yang berkaitan dengan implementasi SIM
TI.02		C. Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS)	
TI.02.00		1. Koneksi	naskah yang berkaitan dengan koneksi JARDIKNAS
TI.02.01		2. Penerapan	naskah yang berkaitan dengan penerapan JARDIKNAS

TI.03		D. Pembelajaran Elektronik Berbasis Radio, Audio, Televisi dan Film
TI.03.00		1. Penerapan sistem
		Naskah yang berkaitan dengan Penerapan sistem
TI.03.01		2. Teknis siaran Radio edukasi, dan Televisi Edukasi (TVE)
		Naskah yang berkaitan dengan Teknis siaran Radio edukasi, dan Televisi Edukasi (TVE)
TI.04		E. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Elektronik
TI.04.00		1. Fasilitasi Guru Pemanfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Radio Televisi dan Film
		Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Guru Pemanfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Radio Televisi dan Film
TI.04.01		2. Fasilitasi Produksi dan Penyiaran pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Produksi dan Penyiaran pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI.04.02		3. Pendampingan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Naskah yang berkaitan dengan Pendampingan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI.05		F. Bahan Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pembelajaran (konten dan aplikasi)
TI.05.00		1. Video Pembelajaran Durasi Pendek
		Naskah yang berkaitan dengan Video Pembelajaran Durasi Pendek
TI.05.01		2. Media Film
		Naskah yang berkaitan dengan Media Film
TI.05.02		3. Program Video Pembelajaran
		Naskah yang berkaitan dengan Program Video Pembelajaran
TI.05.03		4. Video Tutorial <i>Talkshow</i>
		Naskah yang berkaitan dengan Video Tutorial <i>Talkshow</i>
TI.06		G. Televisi Edukasi Pendidikan (TVE)
TI.06.00		1. Siaran Televisi Edukasi Pendidikan (TVE)
		Naskah yang berkaitan dengan Siaran Televisi Edukasi Pendidikan (TVE)

TI.07		H.	Siaran Radio Pendidikan	
TI.07.00			1.	Pengembangan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Pendidikan
				Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Pendidikan
TI.08		I.	Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
TI.08.00			1.	Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI.09		J.	Penerapan Model Pembelajaran Inovatif	
TI.09.00			1.	Model Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas terbuka berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Naskah yang berkaitan dengan Model Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas terbuka berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI.09.01			2.	Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
TI.09.02			3.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
				Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
TI.09.03			4.	Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB) di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB) di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
TI.09.04			5.	Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Multimedia dan web di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.

				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Multimedia dan web di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
	TI.10		K.	Rumah Belajar (E-Pembelajaran)
	TI.10.00		1.	Pengembangan Kualitas Akses Aplikasi Rumah Belajar
				Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Kualitas Akses Aplikasi Rumah Belajar
	TI.10.01		2.	Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Belajar
				Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Belajar
	TI.11		L.	Lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (<i>Indonesian Distance Learning Network</i>)
	TI.11.00		1.	Komunitas <i>Indonesian Distance learning network</i>
				Naskah yang berkaitan dengan Komunitas <i>Indonesian Distance learning network</i>
XII	PP			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PP.00		A.	Rencana/Program Pelatihan
	PP.00.00		1.	Rencana Kebutuhan Pelatihan
				Naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Pelatihan
	PP.00.01		2.	Kurikulum dan Silabus Pelatihan
				Naskah yang berkaitan dengan Kurikulum dan Silabus Pelatihan
	PP.00.02		3.	Struktur Program
				Naskah yang berkaitan dengan Struktur Program
	PP.00.03		4.	Bahan Ajar/Modul
				Naskah yang berkaitan dengan Bahan Ajar/Modul
	PP.00.04		5.	Bahan Tayang
				Naskah yang berkaitan dengan Bahan Tayang
	PP.00.05		6.	Makalah
				Naskah yang berkaitan dengan Makalah
	PP.00.06		7.	Pengembangan Instrumen
				Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Instrumen

PP.00.07		8.	Evaluasi Pelatihan
			Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Pelatihan
PP.00.08		9.	Rapat Koordinasi Kepelatihan
			Naskah yang berkaitan dengan Rapat Koordinasi Kepelatihan
PP.00.09		10.	Analisis Kebutuhan Pelatihan (<i>Training Needs Analysis</i>)
			Naskah yang berkaitan dengan Analisis Kebutuhan Pelatihan (<i>Training Needs Analysis</i>)
PP.01		B.	Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal
PP.01.00		1.	Pelatihan Dasar
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Dasar
PP.01.01		2.	Pelatihan Struktural Kepemimpinan
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
PP.01.02		3.	Pelatihan Manajerial
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Manajerial
PP.01.03		4.	Pelatihan Teknis
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Teknis
PP.01.04		5.	Pelatihan Fungsional
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Fungsional
PP.01.05		6.	Pelatihan Sosial Kultural
			Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Sosial Kultural
PP.01.06		7.	Seminar/Konferensi/Sarasehan
			Naskah yang berkaitan dengan Seminar/Konferensi/Sarasehan
PP.01.07		8.	Workshop/Lokakarya
			Naskah yang berkaitan dengan Workshop/Lokakarya
PP.01.08		9.	Kursus
			Naskah yang berkaitan dengan Kursus
PP.01.09		10.	Penataran
			Naskah yang berkaitan dengan penataran

PP.01.10			11.	Bimbingan Teknis
				Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis
PP.01.11			12.	Sosialisasi
				Naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi
PP.01.12			13.	Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKBT)
				Naskah yang berkaitan dengan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKBT)
PP.01.13			14.	Pelatihan Penyegaran dalam Jabatan
				Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Penyegaran dalam Jabatan
PP.02			C. Penyelenggaraan Pelatihan Non Klasikal	
PP.02.00			1.	<i>Coaching</i>
				Naskah yang berkaitan dengan <i>Coaching</i>
PP.02.01			2.	<i>Mentoring</i>
				Naskah yang berkaitan dengan <i>Mentoring</i>
PP.02.02			3.	<i>e-learning</i>
				Naskah yang berkaitan dengan <i>e-learning</i>
PP.02.03			4.	Pelatihan Jarak Jauh
				Naskah yang berkaitan dengan Pelatihan Jarak Jauh
PP.02.04			5.	Detasering (<i>Secondment</i>)
				Naskah yang berkaitan dengan Detasering (<i>Secondment</i>)
PP.02.05			6.	Pembelajaran Alam Terbuka (<i>Outbound</i>)
				Naskah yang berkaitan dengan Pembelajaran Alam Terbuka (<i>Outbound</i>)
PP.02.06			7.	Patok Banding (<i>Benchmarking</i>)
				Naskah yang berkaitan dengan Patok Banding (<i>Benchmarking</i>)
PP.02.07			8.	Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta/Badan Usaha Milik Negara/Daerah
				Naskah yang berkaitan dengan Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta/Badan Usaha Milik Negara/Daerah
PP.02.08			9.	Belajar Mandiri (<i>Self Development</i>)
				Naskah yang berkaitan dengan Belajar Mandiri (<i>Self Development</i>)

PP.02.09			10.	Komunitas Belajar (<i>Community Practices/Networking</i>)
				Naskah yang berkaitan dengan Komunitas Belajar (<i>Community Practices/Networking</i>)
PP.02.10			11.	Magang/Praktik Kerja
				Naskah yang berkaitan dengan Magang/Praktik Kerja
PP.03			D.	Pengiriman Peserta Pelatihan
PP.03.00			1.	Dalam Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Pengiriman Peserta Pelatihan dalam negeri
PP.03.01			2.	Luar Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Pengiriman Peserta Pelatihan luar negeri
PP.04			E.	Pengiriman Peserta Pendidikan Gelar
PP.04.00			1.	Dalam Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Pengiriman Peserta Pendidikan Gelar dalam negeri
PP.04.01			2.	Luar Negeri
				Naskah yang berkaitan dengan Pengiriman Peserta Pendidikan Gelar luar negeri
PP.05			F.	Sistem informasi kediklatan
PP.05.00			1.	Data lembaga diklat
				Naskah yang berkaitan dengan Data lembaga diklat
PP.05.01			2.	Data sarana dan prasarana diklat
				Naskah yang berkaitan dengan Data sarana dan prasarana diklat
PP.05.02			3.	Data widyaiswara
				Naskah yang berkaitan dengan data widyaiswara
PP.05.03			4.	Data pengelola/penyelenggara diklat
				Naskah yang berkaitan dengan Data pengelola/penyelenggara diklat
PP.05.04			5.	Data program diklat
				Naskah yang berkaitan dengan Data program diklat
PP.05.05			6.	Data peserta diklat
				Naskah yang berkaitan dengan Data peserta diklat

	PP.06		G. Registrasi sertifikat/STTPL peserta diklat
	PP.06.00		1. Buku induk registrasi STTPL
			Naskah yang berkaitan dengan Buku induk registrasi STTPL
XIII	WS		PENGAWASAN
	WS.00		A. Pembinaan Pengawasan
	WS.00.00		1. pembinaan teknis pengawasan
			Naskah yang berkaitan dengan pembinaan teknis pengawasan
	WS.00.01		2. pembinaan satuan pengawasan intern kementerian
			Naskah yang berkaitan dengan pembinaan satuan pengawasan intern kementerian
	WS.01		B. Pengawasan Internal
	WS.01.00		1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal
			Naskah yang terkait dengan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal
	WS.01.01		2. program kerja/rencana pengawasan
			Naskah yang terkait dengan program kerja/rencana pengawasan
	WS.01.02		3. laporan hasil audit
			Naskah yang terkait dengan laporan hasil audit
	WS.01.03		4. laporan hasil revid
			Naskah yang terkait dengan laporan hasil revid
	WS.01.04		5. evaluasi
			Naskah yang terkait dengan evaluasi
	WS.01.05		6. kegiatan pengawasan lain
			Naskah yang terkait dengan kegiatan pengawasan lain
	WS.01.06		7. laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan
			Naskah yang terkait dengan laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan
	WS.01.07		8. penerapan aksi pencegahan, pemberantasan anti korupsi
			Naskah yang terkait dengan penerapan aksi pencegahan, pemberantasan anti korupsi
	WS.01.08		9. laporan hasil ekspose hasil pengawasan
			Naskah yang terkait dengan laporan hasil ekspose hasil pengawasan

WS.01.09			10.	laporan hasil penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi
				Naskah yang terkait dengan laporan hasil penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi
WS.01.10			11.	laporan hasil penyusunan bahan koordinasi pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
				Naskah yang terkait dengan laporan hasil penyusunan bahan koordinasi pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
WS.02			C. laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan kerugian negara	
WS.02.00			1.	laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan
				Naskah yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan
WS.02.01			2.	dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara: tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
				Naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara: tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
WS.03			D. Pengawasan Eksternal	
WS.03.00			1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
WS.03.01			2.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP)
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP)
WS.04			E. Pelaksanaan Pengawasan	
WS.04.00			1.	a. Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut
				b. Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.

				Naskah yang berkaitan dengan Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut dan Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.
WS.04.01			2.	a. Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut
				b. Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut.
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut dan Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut.
WS.05.00			F.	Penanganan Kasus
WS.05.00			1.	Pengaduan, Keluhan Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Kementerian
				Naskah yang berkaitan dengan Pengaduan, Keluhan Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Kementerian
WS.05.01			2.	Pidana
				Naskah yang berkaitan dengan pidana
WS.05.02			3.	Perdata
				Naskah yang berkaitan dengan perdata
WS.05.03			4.	Penyelesaian Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara
				Naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara
WS.06			G.	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
				Naskah yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANSIF

NO.	KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP
1	2	3
IV	DT	PENDIDIKAN TINGGI
	DT.00	A. Pembelajaran
	DT.00.00	1. Pengembangan kurikulum pendidikan akademik Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan kurikulum pendidikan akademik
	DT.00.01	2. Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik
	DT.00.02	3. Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh
	DT.00.03	4. Pengembangan pembelajaran pendidikan khusus Naskah yang berkaitan dengan Pengembangan pembelajaran pendidikan khusus
	DT.00.04	5. Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran
	DT.00.05	6. Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau
	DT.00.06	7. Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau Naskah yang berkaitan dengan Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau
	DT.00.07	8. Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
	DT.00.08	9. Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (PIN SIVIL) Naskah yang berkaitan dengan Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (PIN SIVIL)
	DT.00.09	10. Bimbingan teknis bidang pembelajaran meliputi; pendidikan akademik, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi

			Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan teknis bidang pembelajaran meliputi; pendidikan akademik, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi
	DT.00.10	11.	Monitoring dan evaluasi bidang pembelajaran meliputi pendidikan akademik, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi
			Naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi bidang pembelajaran meliputi pendidikan akademik, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi
	DT.01	B. Kemahasiswaan	
	DT.01.00	1.	Program Penalaran, Kreativitas Minat dan Bakat
			Naskah yang berkaitan dengan Program Penalaran, Kreativitas Minat dan Bakat
	DT.01.01	2	Program Organisasi Kemahasiswaan
			Naskah yang berkaitan dengan Program Organisasi Kemahasiswaan
	DT.01.02	3	Program Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Akademik
			Naskah yang berkaitan dengan Program Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Akademik
	DT.01.03	4	Program Kesejahteraan dan Kewirausahaan
			Naskah yang berkaitan dengan Program Kesejahteraan dan Kewirausahaan
	DT.01.04	5	Penelusuran lulusan mahasiswa dalam sistem PKTS (Pusat Karir dan Penelusuran Lulusan)
			Naskah yang berkaitan dengan Penelusuran lulusan mahasiswa dalam sistem PKTS (Pusat Karir dan Penelusuran Lulusan)
	DT.02	C. Penjaminan Mutu	
	DT.02.00	1	Penyelenggaraan Layanan Uji Kompetensi
			Naskah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Uji Kompetensi
	DT.02.01	2	Penelusuran Lulusan/Portofolio Mahasiswa
			Naskah yang berkaitan dengan Penelusuran Lulusan/Portofolio Mahasiswa
	DT.02.02	3	Instrumen Kompetensi Lulusan
			Naskah yang berkaitan dengan Instrumen Kompetensi Lulusan
	DT.02.03	4	Program Studi Akreditasi Internasional
			Naskah yang berkaitan dengan Program Studi Akreditasi Internasional
	DT.02.04	5	Bimbingan Teknis Bidang Penjaminan Mutu
			Naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Bidang Penjaminan Mutu

DT.02.05		6	Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu
			Naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu
DT.03	D.		KELEMBAGAAN
DT.03.00		1.	Penjaminan Mutu dibidang Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik dan Profesi
			Naskah yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu dibidang kelembagaan perguruan Tinggi Akademik dan profesi
DT.03.01		2	Koordinasi pengelolaan rumah sakit perguruan tinggi
			Naskah yang berkaitan dengan Koordinasi pengelolaan rumah sakit perguruan tinggi
DT.03.02		3	Penilaian dan pengkajian usul kelembagaan perguruan tinggi akademik dan profesi
			Naskah yang berkaitan dengan Penilaian dan pengkajian usul kelembagaan perguruan tinggi akademik dan profesi
DT.03.03		4.	Penyiapan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Profesi
			Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Profesi
DT.03.04		5.	Penyiapan rekomendasi calon penerima bantuan untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi akademik dan profesi
			Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan rekomendasi calon penerima bantuan untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi akademik dan profesi
DT.03.05		6	Penyiapan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi akademik dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing
			Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi akademik dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing
DT.03.06		7	Penyiapan bahan penetapan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi akademik dan Profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah
			Naskah yang berkaitan dengan Penyiapan bahan penetapan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi akademik dan Profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah

	DT.03.07		8	Fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi akademik dan Profesi
				Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi akademik dan Profesi
	DT.03.08		9	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi akademik, penilaian kinerja perguruan tinggi akademik, dan penjaminan mutu di bidang kelembagaan perguruan tinggi akademik
				Naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi akademik, penilaian kinerja perguruan tinggi akademik, dan penjaminan mutu di bidang kelembagaan perguruan tinggi akademik
	DT.03.09		10	laporan di bidang pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi akademik, penilaian kinerja perguruan tinggi akademik, dan penjaminan mutu di bidang kelembagaan perguruan tinggi akademik
				Naskah yang berkaitan dengan laporan di bidang pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi akademik, penilaian kinerja perguruan tinggi akademik, dan penjaminan mutu di bidang kelembagaan perguruan tinggi akademik
	DT.04	E. SUMBER DAYA		
	DT.04.00		1	Sarana dan Prasarana
				Naskah yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana
	DT.04.01		2.	Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Naskah yang berkaitan dengan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	DT.04.02		3	Pembinaan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	DT.04.03		4.	Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Naskah yang berkaitan dengan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	DT.05	F. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		
	DT.05.00		1	Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
				Naskah yang berkaitan dengan usulan Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	DT.05.01		2	Penjaminan Mutu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
				Naskah yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

DT.05.02		3	Fasilitasi Bimbingan Teknis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
			Naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi di bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi
DT.05.03		4	Evaluasi
			Naskah yang berkaitan dengan Evaluasi
DT.06	G. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
DT.06.00		1	Kuliah Kerja Nyata
			Naskah yang berkaitan dengan Kuliah Kerja Nyata
DT.06.01		2	Pengabdian kepada Masyarakat
			Naskah yang berkaitan dengan Pengabdian kepada Masyarakat
DT.06.02		3	Data statistik pengabdian kepada masyarakat
			Naskah yang berkaitan dengan Data statistik pengabdian kepada masyarakat
DT.06.03		4	Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian
			Naskah yang berkaitan dengan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian
DT.06.04		5	Penerbitan hasil pengabdian kepada masyarakat
			Naskah yang berkaitan dengan Penerbitan hasil pengabdian kepada masyarakat
DT.06.05		6	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat
			Naskah yang berkaitan dengan Forum Pengabdian Kepada Masyarakat

REKTOR,


MUHAMMAD ABDY
NIP 196901291994031001